

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Suatu Studi tentang Penyusunan Raperda)

*Implementation of Legislation Functions The Regional of Parliaments
West Kalimantan Province
(A Study Concerning The Planing of Regional Regulation)*

Tony Kurniati¹, AB. Tangdililing², Asmadi³

Program Studi Ilmu Politik
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini dapat dilihat dari a) pelaksanaan fungsi perwakilan, yang belum dapat sepenuhnya mewakili berbagai tuntutan/aspirasi masyarakat, b) pelaksanaan fungsi legislasi hasil Raperda yang dihasilkan DPRD relatif masih rendah, yakni banyak Perda selama kurun waktu tertentu tidak mencapai target, bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun, dan c) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan. Berkenaan dengan output Raperda yang dihasilkan, pada umumnya sebagian besar lebih mencerminkan produk pemerintah daripada keinginan masyarakat, kondisi demikian menunjukkan bahwa fungsi ideal dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerap dan memproses aspirasi masyarakatnya belum berfungsi secara optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat meliputi: a) faktor kemampuan SDM, b) faktor pengalaman, c) faktor penguasaan data dan informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini memiliki kecenderungan menimbulkan banyak permasalahan yang membutuhkan solusi sehingga dimasa mendatang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik lagi.

Kata Kunci. Pelaksanaan, Fungsi Legislasi, DPRD, Penyusunan Raperda.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Fungsi lembaga legislatif dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) menurut versi era reformasi sekarang ini didasarkan pada hubungan yang demokratis (berdasarkan asas kerakyatan). Hubungan yang demokratis yaitu hubungan kekuasaan segitiga yang seimbang dan saling kontrol antara rakyat (warga negara) yang berhak memilih dengan wadah yang mewakilinya, politisi (anggota DPRD dan kepala daerah) serta birokrasi (PNS dan tentara). Melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang lebih *free and fair*, dengan dibantu oleh partai politik peserta pemilu yang menawarkan calon wakil rakyat dan berbagai alternatif program dan kebijakan, rakyat menentukan wakil-wakilnya di DPRD dan/atau kepala daerah yang akan

¹ Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

membuat keputusan perihal kebijakan publik (APBD dan Perda lainnya) bagi rakyat. Karena itu, para anggota DPRD bertanggung jawab kepada konstituennya dan segala tindak tanduknya akan diawasi oleh wadah-wadah yang dibentuk oleh rakyat, seperti lembaga parlemen, forum pemerhati pelayanan publik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan fungsi legislasi Anggota DPRD, para anggota DPRD diberi hak prakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hak amandemen (mengubah Raperda baik secara substansial maupun redaksional), dan hak anggaran termasuk mengajukan RAPBD, mengajukan bentuk dan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja, menentukan alokasi anggaran menurut program dan lokasi sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf d sampai g. Banyak isu publik pada masa Orba diperlukan sebagai isu teknis sehingga diputuskan sendiri oleh badan eksekutif. Tindakan seperti ini merupakan salah satu bentuk pengingkaran asas kerakyatan. Isu publik bukanlah sekedar isu-isu umum yang bersifat abstrak melainkan juga isu-isu yang secara kongkrit dialami, dihadapi, dilakukan, ditanggung dan diukuhkan oleh para warga. “Siapa mendapat apa, apa bentuknya, berapa besarnya, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa” sehingga diputuskan oleh mereka yang mendapat mandat secara langsung dari rakyat. Di pihak lain, isu teknis menyangkut *know how* atau pengetahuan bagaimana melaksanakan, menciptakan, melaporkan, melayani, menegakkan, mengendalikan apa saja yang diputuskan oleh mereka yang mendapat mandat dari rakyat sehingga harus dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keahlian.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat masa periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 jika disimak dengan cermat belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama dalam menyusun Raperda yang memuat daftar urutan prioritas Raperda untuk masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pemda serta memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota dalam tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam program legislasi daerah. Kondisi ini dibuktikan dengan data empiris mengenai rekapitulasi Raperda Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2010 – 2012 bahwa, persentase rasio pembahasan / legislasi (output) masih rendah sangat rendah bila dibandingkan dengan target (input) yang ada. (Sumber: Dokumen Sekretariat DPRD Prov. Kalbar, Nop 2012). Hal tersebut menunjukkan rendahnya peran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi aspek :

- a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat
- b. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat

3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini : Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi tentang penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat?

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, (Soekanto, 2001 : 268). Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Menurut Soekanto (2001:269) dikatakan bahwa: peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks fungsi dan peranan anggota DPRD sebagai salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai melalui suatu mekanisme pemilihan, sehingga mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, maka secara formal lembaga ini memiliki hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :

- Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/Walikota ;
- Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah ;
- Mengadakan Penyelidikan ;
- Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah ;
- Mengajukan pernyataan pendapat ;
- Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
- Menentukan Anggaran Belanja DPRD ;
- Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

DPRD sebagai wakil rakyat diuntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2009, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dirumuskan ke dalam empat fungsi, yakni:

- Fungsi perwakilan (representasi) pada hakikatnya merupakan hubungan antara lembaga legislatif, khususnya anggota DPRD dengan anggota masyarakat yang mereka wakili, baik secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan
- Fungsi legislatif, diwujudkan dalam membuat peraturan daerah bersama kepala daerah
- Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- Fungsi anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah bersama pemerintah daerah

Keempat peranan dan fungsi legislatif tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang saling keterkaitan, sehingga merupakan salah satu masalah politik di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya dan di dalam proses kehidupan badan legislatif pada khususnya, bertolak dari teori demokrasi yang mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah melakukan kegiatan sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena sedemikian banyaknya rakyat dalam suatu sistem politik, maka demokrasi menentukan bahwa sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui wakil mereka di dalam badan legislatif. Dalam konteks ini, para wakil rakyatlah yang bertindak atas nama pihak yang mewakili dan merumuskan serta memutuskan kebijakan tentang berbagai aspek kehidupan, sehingga kita mengenal adanya Pemilihan Umum guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam menentukan anggota badan legislatif. Idealnya anggota legislatif harus bertindak dan

berperilaku sebagai representasi masyarakat untuk setiap tindak tanduk dalam seluruh kegiatannya.

Keberhasilan para wakil rakyat (DPRD) untuk menegakkan keserasian antara kepentingan anggota masyarakat yang diwakilinya dengan kepentingan berbagai kelompok dan lembaga, menurut Sanit (2005: 205) harus memperhatikan empat faktor, yakni :

- 1) Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota badan legislatif.
- 2) Pola hubungan anggota badan tersebut dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin di dalam sistem perwakilan yang berlaku.
- 3) Struktur organisasi badan legislatif yang merupakan kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil rakyat.
- 4) Hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara badan legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit pemerintahan di tingkat daerah, serta hubungan badan tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi tingkatannya.

Peranan anggota legislatif menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sesuai dengan istilah partisipasi maka partisipasi berarti keterlibatan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya di bagi dua yakni, menurut Wahab (2001:141) bahwa “mempengaruhi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan”. Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa Peraturan/Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan/ Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status quo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 2004:134).

Sehubungan saluran aspirasi politik masyarakat kepada pemerintah, Haricahyono (2001:189), membaginya menjadi: partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok tekanan. Pada penulisan ini penulis membatasi pembahasan hanya pada partai politik, yang di sini diartikan sebagai suatu kelompok individu yang terorganisir secara teratur, dan berusaha menguasai pemerintahan, agar bisa memperoleh berbagai keuntungan dari segala bentuk pengawasan yang bisa dilakukannya. Cara kerja sistem politik ditentukan oleh adanya suatu masukan dari lingkungan dan setelah melalui proses tertentu membentuk sejumlah output. Selanjutnya output ini diberikan kembali kepada lingkungan sebagai umpan balik. Input terdiri dari dukungan-dukungan dan tuntutan-tuntutan. Dukungan dapat terarah kepada masyarakat politik; rezim atau cara pemerintah (asas-asas politik yang berlaku, tujuan-tujuan dan norma-norma); dan para pemegang kekuasaan (otoritas). Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah kebijaksanaan pemerintah atau norma-norma dan produk yuridis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bersama (Marbun, 2004:40).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan warga negara lainnya secara individual terjadi benturan di antara ini. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan warga negara, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah politik. Menurut Haricahyono (2001:47), partisipasi adalah suatu usaha terorganisir dari para warga negara untuk mempengaruhi bentuk jalannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap negara mempunyai ruang dan atensi tersendiri terhadap kemungkinan-kemungkinan partisipasi politik warga negaranya. Hal senada juga terungkap oleh Budiharjo (2002:57) yang menyatakan bahwa: “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah”. Kegiatan ini menurut Budiharjo mencakup tindakan, seperti memberikan suara pada pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota

suatu partai politik atau kelompok kepentingan, dan mengadakan hubungan dengan pejabat atau parlemen.

Peranan anggota legislatif menyelenggarakan tugas membahas dan memberikan persetujuan Raperda, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Pemda, dengan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka anggota legislatif mempunyai fungsi untuk melaksanakan perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis rancangan peraturan daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang legislasi;
- d. Membentuk peraturan daerah bernomor gubernur, bupati/walikota;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan anggota legislatif dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pencapaian satu tujuan dalam rangka membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah, akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung dari sifat dan bidang kegiatan atau usaha dalam melaksanakan peranannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prawirosentono (2002:32) bahwa: ada tiga faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya peranan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu: (1) faktor pendidikan (kemampuan aparat); (2) faktor data/informasi; (3) faktor pengalaman.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian yang ditetapkan dengan tekhnim bertujuan (*purposive*) terdiri dari komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses penyusunan Perda yang terdiri dari : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Badan Legislasi (Banleg), Sekretaris Dewan (Sekwan), beberapa tokoh politik masyarakat dan pengusaha. Teknik dan alat pengumpul data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen pengumpulan data berupa panduan observasi, panduan wawancara dan alat dokumentasi berupa kamera dan foto copy. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data penelitian ini merupakan interpretasi data yang berbentuk kualitatif dengan tahapan pengumpulan, reduksi, interpretasi, pengajian dan penarikan kesimpulan yang merupakan langkah akhir penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat

1. Perwakilan

Diperoleh keterangan bahwa, secara umum pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat itu cukup baik. Namun tentu perlu diakui bahwa di dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih belum sempurna seperti yang diharapkan. Salah satunya pernah terjadi beberapa kali rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat batal karena tidak dihadiri oleh mayoritas anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD di dalam penyusunan Raperda sudah menjadi alat kelengkapan dewan dan menjadi badan tersendiri dan berkonsultasi dengan instansi terkait maupun instansi vertikal. Seperti Biro Hukum di Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Kalbar sebagai leading sektor bidang penyiapan Raperda serta Kementerian Hukum dan HAM. Keterangan selanjutnya

menyatakan bahwa fungsi legislasi, anggota DPRD Provinsi Kalbar mempunyai dua fungsi di dalam proses penyusunan atau pembuatan suatu produk legislasi, yaitu berupa penggunaan hak inisiatif untuk menyusun suatu produk legislasi dan berdasarkan usulan dari eksekutif untuk membahas sebuah produk legislasi. Se jauh ini fungsi-fungsi legislasi itu dituangkan di dalam sebuah program legislasi daerah atau Prolegda yang setiap tahun telah dicantumkan di dalam tahun berjalannya tersebut, menggunakan APBD pada tahun berjalan tersebut, telah direncanakan, diprogramkan penyusunan produk legislasi yang akan direalisasikan pada tahun berjalan tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditelaah bahwa, DPRD sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan Pemda, baik mengenai urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan harus proaktif dalam menggali dan mencari tahu tentang sesuatu yang baru dan berupaya untuk mengikuti perkembangan berbagai ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan masyarakat dan selanjutnya ilmu pengetahuan tersebut diupayakan untuk disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu tokoh politik masyarakat menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Kalbar belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranannya, terutama dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan Pemda, seperti kegiatan yang berkaitan dengan masalah urusan pembangunan meliputi pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Sejak dulu masyarakat sudah mengetahui kelemahan DPRD (Legislatif) peranannya dalam sistem politik di Indonesia. Banyak yang mengatakan DPRD zaman Orde Baru kecil sekali peranannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, kalau sedikit vokal akan mendapatkan recall dari Ketua Partainya. Sekarang ini nuansanya sudah lain tidak dikenal lagi yang namanya recall anggota DPRD, sehingga anggota DPRD harus memperjuangkan aspirasi kehendak masyarakat dalam menentukan kebijakan. Tetapi untuk merespon aspirasi masyarakat tersebut lembaga DPRD masih mengalami kendala-kendala.

Lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa, selama periode 2009-2014, DPRD pernah berkeinginan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, yang nantinya akan diteruskan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus). Namun hal tersebut masih terkendala, karena belum semua fraksi di DPRD satu pendapat dengan sejumlah anggota dewan yang ingin menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut. Sehingga ketika sampai di tingkat rapat paripurna upaya untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait pembentukan Pansus untuk menyelidiki persoalan aset di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi batal diwujudkan setelah melalui proses mekanisme voting. Di samping itu masih ada beberapa agenda yang masih tertunda yang disebabkan keterbatasan sebagai manusia maupun dari masing-masing individu maupun anggota DPRD secara kelembagaan. Berdasarkan keterangan ini diinterpretasikan bahwa, ada permasalahan utama yang sering mengemuka adalah persoalan dengan Sumber Daya Manusianya (SDM), dikarenakan disini banyak muka-muka baru yang masih harus banyak belajar dalam teknik perumusan Raperda. Bukan berarti mereka tidak mau belajar dimana kalau mereka kurang memahami persoalan yang dihadapinya, maka mereka dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli yang telah disiapkan di DPRD.

Pada kenyataannya sebagian anggota DPRD diinyah karena rekrimen Partai yang kurang berlangsung dengan baik, banyak diantara anggota dewan yang mengatakan demikian bahkan orang luar sekalipun (masyarakat) dan eksekutif juga mengatakan demikian. Karena kurang pemahaman tentang teknik perumusan rancangan Perda dan juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai sehingga dalam melakukan pembahasan Raperda kadang kala terhambat. Karena adanya tarik ulur berkepanjangan antara anggota DPRD itu sendiri yang ikut terlibat dalam pembahasan Raperda tersebut dengan Eksekutif, tetapi walaupun demikian akhirnya Perda itu selesai juga. Sering kali terjadi pemahaman yang sepele sehingga menjadikan molor waktu dalam pembahasan Raperda yang ingin cepat diselesaikan.

Hampir sebagian besar anggota DPRD muka baru, dengan langkanya pengalaman mereka mengenai teknik perumusan Raperda menyebabkan berbagai kesulitan dalam pembahasan tersebut. Tetapi sebaliknya para anggota yang lama justru kurang membantu anggota baru untuk memahami cara perumusan Raperda, sehingga argumentasi yang diajukan oleh anggota yang baru ini tidak sesuai dengan tujuan yang dibahas. Persoalan ini biasanya dapat diatasi oleh ketua Pansus yang netral dan tidak memihak kepentingan manapun juga dan kesadaran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan pentingnya musyawarah dan mufakat. Badan Legislasi (Banleg) sudah memberikan masukan-masukan kepada anggota baru untuk memahami teknik dalam perumusan pembahasan Raperda yang diajukan oleh eksekutif. Tetapi masih terlihat minimnya pengetahuan anggota baru dalam hal ini. Apabila usulan-usulan itu ada di DPRD tentunya diharapkan proses tersebut harus mengikuti mekanisme serta prosedur yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan sepanjang proses mekanisme serta koridor tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, silahkan saja mempergunakan hak-hak tersebut. Berdasarkan data bahwa, secara umum kemampuan SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dianggap cukup, karena rata-rata pendidikan terakhir anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah Sarjana S3, 1 orang (1,82%), Pasca Sarjana 15 orang (27,27%), Sarjana 30 orang (54,54%), Sarjana Muda 1 orang (1,82%), SLTA 8 orang (14,55%). Namun pengalamannya kurang dalam merumuskan Perda (kebijakan) sehingga mengakibatkan banyak sekali hambatan karena sering sekali terjadi perbedaan persepsi tentang suatu substansi diperdebatkan sampai lama hingga nyaris mengesampingkan masalah pokok yang seharusnya dibahas.

Berlawanan dengan proses rekrutmen anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yaitu bersifat sangat tertutup karena untuk menentukan siapa yang akan direkrutmen duduk dalam lembaga DPRD itu, bukannya pemilih tetapi pimpinan partainya. Di sini terlihat dengan adanya ketentuan rangking yang dicalonkan oleh ketua partai. Sebagai contoh ada calon yang sangat populer di daerah pemilihannya (Kabupaten/kota) yang dicalonkan oleh partainya tetapi tidak terpilih untuk mewakili daerahnya duduk dilembaga DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Karena rangkingnya diubah yang tidak dimungkinkan untuk terpilih mewakili daerahnya di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini terbukti sekali kuatnya dominan ketua partai dalam menentukan siapa calon yang menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mewakili daerahnya. Sehingga banyak sekali anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat itu dia tidak tahu perkembangan yang terjadi di daerah pemilihannya sendiri, dan tidak kita mustahikan ada anggota DPRD itu hanya numpang lahir saja di daerah pemilihannya. Setelah itu dia dibesarkan di ibu kota provinsi sampai menyelesaikan pendidikannya, sehingga dia tidak tahu bahwa di daerahnya sudah banyak perubahan sementara dia masih sebagai anggota DPRD berpikir di ibu kota provinsi.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa, kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi pembahasan perumusan Raperda oleh Legislatif faktor penunjang dan penghambat yang berasal dari Legislatif telah disinyalir yang meliputi : Informasi, Kerdilan, Social Power, Popularitas, Legitimasi, Kepemimpinan, Peraturan (*Rulles*), kekurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana penelitian dan kepustakaan, kekurangan tenaga Sekretariat dan kurang tersosialisasi komisi-komisi yang ada di dewan. Hasil wawancara menegaskan bahwa selalu adanya berprinsip dan selalu mempedomani setiap peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih atas atau Pusat. Dalam setiap ada perubahan eksekutif selalu berkoordinasi dengan Pusat maupun dengan Daerah lain di Indonesia. Sehingga pengalaman eksekutif dalam Raperda kemampuannya lebih berpengalaman dibanding dengan Legislatif. Oleh karena itu setiap rumusan Raperda yang diajukan oleh eksekutif ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat biasanya telah mendekati kesempurnaan. Pengalaman ini dikarenakan tugas-tugas rutin eksekutif menyebabkan eksekutif sangat menguasai kondisi lapangan dibandingkan legislatif. Apalagi eksekutif didukung oleh kemampuan dan tenaga ahli di bidangnya juga sarana yang memadai. Melalui beberapa tingkatan sistem yang dilaksanakan dalam rangka menuju penetapan sebuah Raperda, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun DPRD Provinsi Kalbar tentu melibatkan tenaga ahli guna membantu merancang draft Raperda. Dan ketika Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat maupun DPRD Provinsi Kalimantan Barat meminta seorang tenaga ahli untuk merancang suatu draft Raperda tentu sebelumnya tenaga ahli akan melibatkan sejumlah *stakeholder* termasuk masyarakat untuk mendengarkan serta mendapatkan masukan guna merancang draft Raperda tersebut, meskipun terbatas dan belum maksimal. Kemudian proses pembahasan di DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga melibatkan *stakeholder* dan masyarakat yang terkait langsung dengan Raperda tersebut, meskipun juga masih terbatas dan belum maksimal. Di samping itu terbatasnya waktu yang diberikan belum terlalu menyentuh pemahaman masyarakat terhadap Raperda yang akan dibahas. Interpretasi penulis terhadap data mengenai aspek perwakilhan ini menyatakan bahwa, fungsi keterwakilan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan harapan dan kehendak aspirasi masyarakat.

2. Legislasi

Diperoleh keterangan bahwa, upaya yang dilakukan Badan Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam memperbaiki sistem yang melibatkan masyarakat dalam penggunaan *public hearing* di dalam setiap pembahasan Raperda di DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus), maka seharusnya Pansus sudah bisa menentukan apakah perlu melibatkan masyarakat atau sebaliknya. apabila diposisikan angkanya berkisar antara 30-40 persen saja. Sehingga ke depan setiap Pansus yang membahas Raperda perlu melakukan *public hearing* guna menjangkau serta mendapatkan beragam masukan dari *stakeholder* dan masyarakat terkait Raperda tersebut. Ada beberapa cara yang dipergunakan DPRD di dalam mengenali aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah *reses*. Bahan demo yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat juga bisa dipergunakan untuk mengenali serta menyerap beragam aspirasi masyarakat dan sejauh ini metode yang dominan dipergunakan DPRD untuk mengenali aspirasi masyarakat adalah melalui *reses*. Setelah itu baru *on the spot* serta monitoring terkait pelaksanaan APBD Kaltar. Tokoh politik selalu dilibatkan untuk menghadiri undangan dari DPRD terutama Ketua Komisi, dengan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di daerah. Kemudian menurut pengetahuan tokoh masyarakat tersebut, dikatakan bahwa ketidakhadiran masyarakat dalam rapat-rapat koordinasi yang diadakan baik oleh DPRD melalui Komisi, bukan hanya karena masyarakat letih setelah bekerja seharian, akan tetapi menurut pengetahuan tokoh masyarakat tersebut dikatakan bahwa rapat-rapat koordinasi yang diadakan memang tidak mengundang seluruh masyarakat (hanya sebagian kecil saja yang diundang). Sehingga wajar kalau masyarakat tidak menghadiri kegiatan tersebut. Akses yang dimiliki oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD yang dituangkan di dalam penyusunan Raperda belum pernah melibatkan *public hearing* dari sebuah produk Perda tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti sekarang ini, produk Perda yang sedang disusun Pansus terkait dengan kesehatan reproduksi. Namun Pansus hanya melakukan studi banding dan melakukan konsultasi. Kemudian melakukan rapat intern dengan mitra kerja dan langsung dibuat laporan di dalam rapat paripurna DPRD untuk penetapan sebuah Perda. Kemudian ada kontribusi informasi yang menarik yang diinformasikan kepada Pansus dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan produk Perda tersebut. Seperti bidan desa, masyarakat kesehatan, dokter maupun dukun kampung yang memang tidak mempunyai akses dengan Puskesmas terdekat. Mereka belum pernah memberikan masukan kepada Pansus kesehatan reproduksi. Setiap penyusunan Raperda DPRD sangat jarang melakukan *public hearing*. Karena ada dua mekanisme yang dilihat agak terputus. Pertama, selalu orientasi Pansus itu melakukan studi banding ke daerah yang sudah mempunyai Perda sejenis. Kemudian mengkonsultasikan draf Raperda yang telah disusun tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Hukum. Tetapi ke dalam daerahnya sendiri sebagai pengujian akan diaplikasikannya Perda tersebut kepada masyarakat umum, hal itu sangat jarang dilakukan.

Berdasarkan keterangan yang ada maka dapat dikatakan bahwa, DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan sarana dari aspirasi masyarakat melalui perwakilannya melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kelembagaan sosial lainnya. Dengan demikian maka sebaliknya DPRD juga belum secara maksimal dapat mencapainya berbagai aspirasi masyarakat, dalam kaitannya dengan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah.

DPRD Provinsi Kalimantan Barat itu selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan langsung beragam aspirasinya untuk disampaikan langsung di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat maupun saat melakukan penetapan Raperda. Secara khusus hal seperti itu memang belum pernah dilakukan di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Namun apabila alat kelengkapan dewan mengharapkan untuk dilakukan ataupun menggelar kegiatan seperti itu, tentunya pimpinan dewan akan mengakomodir permintaan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah atau belum melaksanakan perannya sebagai wadah penampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kiranya tidak cukup kalau hanya mengetahui bagaimana keterlibatan wakil masyarakat dalam kehadiran rapat koordinasi saja yang dilakukan oleh Ketua DPRD melalui Komisi. Berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat diperoleh keterangan bahwa, kemampuan dan kesanggupan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai wakil masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat masih kurang maksimal. Karena masih banyak urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya mengenai urusan pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan yang belum terwujud sebagaimana tugas dan peranan DPRD. Untuk melakukan penilaian terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka diperlukan indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pada tataran ini, indikator menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*) maupun setelah kegiatan selesai (*ex-post*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap peran DPRD Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada pelaksanaan hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini yakni fungsi perwakilan.

Kemampuan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat memerankan fungsi legislasi dari lembaga tersebut terdiri dari daya persepsi anggota tentang masyarakat dan masalah yang dihadapi serta kepentingan dari yang diwakili. Di samping itu, fungsi perwakilan dilakukan pula sebagai kemampuan anggota untuk menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat masyarakat. Kemampuan anggota untuk memahami masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang terbentuk di dalam masyarakat, dilandasi oleh proses sosialisasi dan pengalaman mereka. Sedangkan kemampuan anggota untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dilandasi oleh sistem perwakilan yang berlaku organisasi dan prosedur di dalam badan legislatif dan pola hubungan anggota dengan pihak eksekutif.

Operasionalisasi fungsi legislasi yang diemban oleh lembaga legislatif ini dijabarkan melalui beberapa parameter pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga legislatif daerah, dalam hal ini sikap anggota DPRD dalam merespon keluhan masyarakat serta penggunaan keluhan masyarakat sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan di masa mendatang juga dapat dijadikan parameter untuk melihat seberapa besar pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa fungsi perwakilan yang diemban oleh lembaga legislatif daerah belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada lembaga legislatif lokal baik dalam bentuk orasi, dengar pendapat, demonstrasi maupun pengirisan delegasi baik perorangan maupun kelompok. Saat ini hampir setiap hari gedung DPRD selalu dipenuhi oleh masyarakat yang datang menyampaikan tuntutan aspirasinya, bahkan tidak jarang ada yang sampai menginap berhari-hari lamanya dengan harapan tuntutan mereka dapat dipenuhi atau diperjuangkan oleh anggota Dewan. Apalagi gedung DPRD sudah dinyatakan sebagai rumah rakyat, sehingga rakyat dapat dengan bebas menyampaikan keinginannya. Berdasarkan informasi dari salah satu tokoh politik masyarakat dan pengusaha, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan Raperda yang dilakukan DPRD dalam rangka melaksanakan peranannya, belum berjalan sesuai dengan harapan. Anggota DPRD adalah wakil dari masyarakat pemilihnya. Dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat, DPRD harus melaksanakan konsultasi

publik, mengadakan forum dialog, memperhatikan usul, saran dan pendapat masyarakat melalui pertemuan khusus dengan masyarakat. Karena aspirasi masyarakat tersebut disampaikan kepada DPRD, sebelum disampaikan, maka dibahas dalam rakorbang. Usul dan saran masyarakat sepanjang masih dalam kewenangan daerah dapat diselesaikan pada tingkat daerah, sebagai penentuan ukuran atau pedoman baku. Tokoh politik masyarakat Kalbar memberikan penjelasan bahwa, untuk menentukan pedoman baku DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Raperda, namun aspirasi yang tertuang dalam usulan dan saran dari masyarakat masih ada yang belum terwujud, seperti usulan mengenai urusan pembangunan dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan olah raga, seperti masih banyak jalan, jembatan, irigasi yang belum diperbaiki. Kemudian fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola dan Gedung Olahraga yang belum dikelola dengan baik. Pada pertemuan sering kali dibahas, namun pada kenyataannya sampai sekarang belum terealisasi. Sementara DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat kurang aktif dalam rangka mengawasi kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat di Kalimantan Barat pada umumnya dalam menyampaikan aspirasinya, bukan berupa usulan atau saran, tetapi sebagian besar adalah tuntutan dengan berbagai macam permintaan yang harus segera dilaksanakan sesuai dengan peranan DPRD selaku penyalur aspirasi masyarakat pemilihnya. Tagas DPRD tetap melakukan pengawalan terhadap aktivitas pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti menetapkan peraturan daerah, menyusun, mengajukan dan membahas rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), membina kehidupan masyarakat secara menyeluruh, membina perekonomian daerah dengan melakukan pengawasan secara kontinyu dan mengkoordinasikan pembangunan daerah secara partisipatif.

Sebagai suatu Lembaga yang berfungsi untuk menumbuhkan segenap prakarsa masyarakat maka DPRD harus melakukan berbagai upaya. Diantaranya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencari tahu tentang apa-apa yang menjadi keinginan masyarakatnya, tentang apa-apa yang menjadi cita-cita masyarakatnya dan juga harus dapat memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang sesuatu yang baru misalnya mengenai Raperda. Hasil observasi diketahui bahwa, tindakan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi yaitu merespon aspirasi dari masyarakat terlihat belum maksimal. Karena dari sedikitnya anggota DPRD yang mau menerima dan mendengarkan tuntutan mereka bahkan kadang-kadang hanya anggota Dewan tertentu saja yang selalu ditunjuk untuk menerima masyarakat yang datang ke gedung DPRD untuk menyalurkan aspirasinya melalui rakorbang. Di samping itu, keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat belum semuanya digunakan sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan di masa mendatang, seperti tuntutan/keluhan masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan DPRD dalam penyelesaian suatu masalah terlihat dari semakin maraknya demo-demo yang ditujukan terhadap Dewan akhir-akhir ini. Bahkan sejumlah informan dari kalangan tokoh politik masyarakat yang berhasil diwawancarai memberikan keterangan ketidakpuasan mereka terhadap peran DPRD, menunjukkan belum optimal karena apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, semuanya belum tertampung dengan baik, sehingga diperlukan suatu keseimbangan baru yang bersifat egaliter, mengingat posisi DPRD saat ini terkesan lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif dan terkadang memunculkan arogansi dari anggota Dewan itu sendiri.

Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja DPRD. Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi anggota legislatif daerah dipergunakan untuk menampung aspirasi dan problem dari masyarakat, yang selanjutnya dicarikan solusi pemecahannya. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota legislatif lokal secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan masyarakat. Konteks ini, idealnya segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota Dewan hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemampuan dan sumberdaya dari anggota Dewan ini

sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. Kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya akan dapat maksimal apabila konsentrasi anggota Dewan benar-benar tercurah untuk melayani masyarakat. Kondisi pelayanan yang ideal tersebut dalam realitanya sulit untuk diwujudkan, karena pada kenyataannya masih banyak anggota Dewan yang melakukan tugas-tugas/pekerjaan lain di luar tugasnya sebagai anggota legislatif. Sebenarnya kondisi tersebut bukan barang baru lagi di kalangan anggota Dewan. Sinyalemen tersebut sangat tampak ditujukan kepada sebagian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya diperoleh informasi bahwa pendekatan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah, seperti pemerintah daerah bersama-sama DPRD membahas rancangan peraturan daerah dengan menggal, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama mengenai urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terjalinnya keharmonisan hubungan antara DPRD dan Pemda Provinsi Kalimantan Barat diharapkan agar masyarakat Provinsi Kalimantan Barat merasa aspirasinya dapat tersalurkan melalui DPRD tersebut. Dari segi kelembagaan, sering dirasakan oleh sementara masyarakat seolah-olah legislatif belum begitu berperan dalam melakukan fungsi kontrol populer yang dimilikinya, yakni pengawasan masyarakat terhadap pembangunan. Pengawasan sosial nampaknya belum dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Hal tersebut antara lain karena wadah penyalur aspirasi/keinginan rakyat yang juga merupakan salah satu fungsi kontrol belum berfungsi dengan baik. Pengawasan sosial melalui lembaga legislatif juga masih lemah, terbukti dengan masih banyaknya kritik masyarakat yang ditujukan kepada DPRD, baik yang dilontarkan secara langsung maupun melalui media massa yang menyatakan bahwa DPRD belum dapat berbuat banyak dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang perencanaan pembangunan. Dengan demikian, dalam konteks DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan Raperda oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan, berbagai kendala masih dirasakan antara lain kurangnya keterlibatan masyarakat yang dianggap dapat menimbulkan instabilitas politik. Sementara itu, kalangan masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, terasa belum sepenuhnya hak-hak tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah misalnya, DPRD dikatakan masih banyak tergantung kepada eksekutif, hal ini menunjukkan bahwa hak inisiatif serta beberapa hak lainnya belum dapat digunakan secara optimal. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena kurangnya kapasitas lembaga legislatif dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang tersedia. Aktivitas DPRD Provinsi Kalimantan Barat pasca pelaksanaan fungsi legislasi lebih bersifat eksekutif sentris, dalam arti perhatiannya terhadap masyarakat yang lebih luas lagi tidaklah cukup dilembagakan dalam komisi-komisi yang sudah ada, melainkan timbul kecenderungan atau gejala bahwa aktivitas DPRD lebih ditujukan pada aktivitas eksekutif. Sambungan atau perkaitan kembali antara Dewan dengan masyarakat yang selalu dihubungkan dengan gaya departemental dan hanya dilakukan dalam acara dengan pendapat dan kunjungan ke daerah-daerah ketika masa reses berlangsung ketimbang *fact finding* dalam arti yang mendalam melalui pelaksanaan hak angketnya.

Berdasarkan observasi di atas ini bahwa, kondisi yang menyebabkan keterlibatan masyarakat atas usulan-usulan atau ide-ide, saran-saran dan gagasan-gagasan masyarakat di Kalimantan Barat itu hanya berupa "permintaan" dikarenakan oleh kemampuan berpikir dari masyarakat tersebut yang memang masih perlu ditingkatkan. Atau dengan kata lain terjadinya kondisi yang demikian adalah dikarenakan persoalan SDM yang masih rendah. Keterlibatan masyarakat terhadap Raperda merupakan salah satu potensi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat digali untuk dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Dikatakan merupakan salah satu potensi, karena dengan adanya kegiatan Raperda, maka sesuatu yang dirasakan berat dapat menjadi ringan karena dipikul atau ditanggung bersama-sama. Kemudian dengan adanya kegiatan Rakorbang, segala sesuatunya dapat dirasakan sebagai milik bersama dan dengan demikian maka secara bersama-sama pula masyarakat akan menjaga dan merawat sesuatu yang mereka rasakan sebagai milik bersama tersebut.

Diketahui bahwa, pada tahun 2012 DPRD Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pembahasan 20 Raperda. Namun hanya 8 (delapan) yang disetujui atau ditetapkan, sedangkan 12 Raperda tidak dibahas. Hambatan yang terjadi adalah waktu. Dimana terdapat tiga buah Perda APBD, yakni, Perda APBD Murni, Perda APBD Perubahan serta Perda APBD Perhitungan. Ketiga Perda APBD ini tentu tidak bisa ditawar-tawar. Sementara itu di luar ketiga Perda APBD ini memang DPRD mempunyai program yang tertuang di dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan DPRD juga mempunyai keterbatasan di dalam membagi personil yang ada untuk dilibatkan di dalam pembahasan Perda tersebut. Serta persoalan keterbatasan waktu yang selama ini disediakan untuk melaksanakan beragam agenda kedewanan. Karena tugas, pokok serta fungsi DPRD itu bukan hanya fungsi legislasi, melainkan juga tugas sebagai fungsi kontrol dan penganggaran juga harus dilaksanakan secara beriringan. Informan dari tokoh menerangkan bahwa, keterlibatan masyarakat terhadap Raperda, pihak Pemerintah daerah dan DPRD melukainya dengan cara meminta sumbangan ide dan pendapat masyarakat, apabila Pemerintah daerah dan DPRD merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pembangunan, kemudian Pemerintah daerah dan DPRD merasa memerlukan suatu kegiatan Raperda. Berdasarkan keterangan ini dapat diinterpretasikan bahwa, penyusunan Raperda yang diprakarsai oleh pemerintah daerah berdasarkan usulan dari inisiatif DPRD, dengan ketentuan yaitu sebelumnya masyarakat memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan tersebut. Selama ini dokumen Prolegda yang tahun lalu belum selesai dibahas diteruskan pada tahun depan. Tetapi kalau ada satu pembahasan Perda yang sudah ada Pansusnya, dan Raperda tersebut belum terselesaikan maka Pansus tersebut akan berpindah ke tahun berikutnya. Karena satu tahun berlakunya tahun anggaran pembiayaan terhadap Pansus tersebut, hanya berlaku pada tahun tersebut.

3. Pengawasan

Kemampuan anggota legislatif memerankan fungsi pengawasan dari lembaga tersebut terdiri dari daya persepsi anggota tentang masyarakat dan masalah yang dihadapi serta kepentingan dari yang diwakili. Disamping itu, fungsi perwakilan diartikan pula sebagai kemampuan anggota untuk menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat masyarakat. Kemampuan anggota untuk memahami masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang terbentuk di dalam masyarakat, dilandasi oleh proses sosialisasi dan pengalaman mereka. Sedangkan kemampuan anggota untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dilandasi oleh sistem perwakilan yang berlaku organisasi dan prosedur di dalam badan legislatif dan pola hubungan anggota dengan pihak eksekutif.

Diperoleh keterangan bahwa, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kegiatan Pemerintah daerah, sehubungan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, kurang memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Memfasilitasi merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi kepada masyarakat. Mengadakan bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat. Bertolak dari kenyataan ini bahwa, anggota yang melaksanakan fungsi dari lembaga tersebut diperlukan kadar pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip dan tata kerja institusi tersebut. Disamping itu, anggota lembaga legislatif perlu mempunyai tingkat pemahaman tertentu mengenai kultur politik dan nilai serta kepentingan-kepentingan yang melandasi tingkah laku politik anggota masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, fungsi perwakilan diartikan sebagai kemampuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas penyelesaian masalah serta mengembangkan program-program kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Fungsi representatif dimasukkan

sebagai salah satu indikator kinerja karena fungsi pengawasan secara langsung menggambarkan kemampuan anggota Dewan dalam menjalankan misi dan tujuan yang diembannya, khususnya sebagai lembaga legeslatif daerah.

Operasionalisasinya fungsi pengawasan yang diemban oleh lembaga legeslatif lokal ini dijabarkan melalui beberapa parameter pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga legislatif daerah, dalam hal ini sikap anggota Dewan dalam merespon keluhan masyarakat serta penggunaan keluhan masyarakat sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan dimasa mendatang juga dapat dijadikan parameter untuk melihat seberapa besar pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh lembaga legeslatif. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban oleh lembaga legeslatif daerah belum sesuai dengan harapan masyarakat. Diperoleh keterangan bahwa, selama ini proses pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap eksekutif belum maksimal. Proses tersebut tidak selalu seiring sejalan dan biasa terjadi kontradiksi antara masing-masing fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap para informan tersebut, maka dapat ditelaah bahwa dalam hal upaya untuk meningkatkan aspirasi masyarakat, DPRD belum mampu untuk melaksanakannya. Dengan demikian maka wajar jika masyarakat di Kalimantan Barat belum secara utuh memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan, saran-saran, dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Akibat lainnya sudah menjadi kewajiban juga kalau masyarakat dalam memberikan saran-saran dan usul tentang urusan pembangunan itu hanya berupa permohonan atau permintaan-permintaan saja. Melihat kondisi yang demikian maka semestinya, pihak DPRD mau untuk melakukan suatu studi banding ke daerah lain yang dianggap lebih maju, kemudian terhadap pengetahuan yang diperoleh dari studi banding tersebut disebarluaskan atau disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian maka secara perlahan tentunya akan berdampak pada kemajuan baik berpikir maupun bertindak dari masyarakat tersebut. Observasi terhadap sikap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa, respon mereka terhadap aspirasi dari masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari sedikitnya anggota DPRD yang mau menerima dan mendengarkan tuntutan mereka bahkan kadang-kadang hanya anggota DPRD tertentu saja yang selalu ditunjuk untuk menerima masyarakat yang datang ke gedung DPRD untuk menyalurkan aspirasinya. Di samping itu, keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat belum semuanya digunakan sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan dimasa mendatang, seperti tuntutan/keluhan masyarakat tentang berbagai fasilitas yang diterima anggota DPRD serta tuntutan agar anggota DPRD tidak menghambur-hamburkan uang dengan jalan-jalan keluar daerah yang dikemas dalam bentuk kunjungan kerja belum dianggapi secara serius.

Akhir-akhir ini beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Padahal belum tentu hasil dari pada kunjungan tersebut bermanfaat dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan masyarakat Kalimantan Barat, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Ketua Banleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi informan dalam penelitian ini, bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan DPRD dalam penyelesaian suatu masalah terlihat dari semakin maraknya demo-demo yang ditujukan terhadap dewan akhir-akhir ini. Bahkan sejumlah informan dari kalangan Tokoh Masyarakat yang berhasil diwawancarai mengatakan ketidakpuasan mereka terhadap kemampuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda selama ini. Diketahui juga bahwa, perilaku DPRD akhir-akhir ini kurang bisa menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Padahal ini adalah sesuatu yang

fundamental, yang mesti dilaksanakan oleh Dewan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni menggelembungkan kepentingan anggota Dewan, sehingga asumsi yang ada dalam masyarakat bahwa orang-orang yang dipercayai sebagai wakil rakyat bukan lagi representasi rakyat, karena rakyat tidak terwakili dengan keberadaan mereka.

Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari DPRD bisa menjadi parameter untuk menilai kemampuan DPRD dalam melakukan penyusunan Raperda. Orientasi pada penyusunan Raperda menunjuk pada seberapa banyak energi anggota legislatif daerah dipergunakan untuk menampung aspirasi dan problem dari masyarakat, yang selanjutnya dicarikan solusi pemecahannya. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota legislatif lokal secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, idealnya segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota DPRD hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemampuan dan sumberdaya dari anggota DPRD ini sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai.

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan tersebut, perkembangan perjalanan DPRD provinsi Kalimantan Barat periode 2009-2014 mempunyai suatu spirit untuk selalu intropeksi dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Agar apa yang dilakukan DPRD benar-benar merupakan cerminan harapan rakyat. Meskipun pada faktanya peran dan fungsi legislasi DPRD sebagai sebuah lembaga belum maksimal diimplementasikan bahkan terasa masih jauh dari tuntutan publik. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut di atas karena sebagian besar anggota dewan seringkali lebih mementingkan perjalanan ke luar daerah ketimbang memfokuskan membahas masalah-masalah jalannya pemerintahan termasuk di dalamnya melakukan pembahasan secara intensif raperda yang sedang diajukan. Akibatnya tidak sedikit pembahasan raperda yang tidak dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencitraan lembaga DPRD di mata publik. Kesan yang muncul di masyarakat seolah-olah anggota dewan lebih suka jalan-jalan ketimbang melaksanakan fungsi dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Inilah salah satu intropeksi yang harus dilakukan oleh DPRD provinsi Kalimantan Barat.

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat

1. Faktor Kemampuan Anggota DPRD

Diperoleh keterangan berkenaan dengan kualitas SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat bahwa, jika dilihat tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2009 – 2014 secara keseluruhan dapat dikatakan cukup tinggi, karena dari 55 orang anggota sekitar 61.82% adalah sarjana (S1) selebihnya serjana muda dan tamatan SLTA. Namun mengenai kualitas SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Badan Legislasi (Banleg) dalam melaksanakan fungsi legislasi melalui program legislasi daerah masih rendah, baik dalam mengelola data dan informasi yang di dapat dari masyarakat maupun dalam penyusunan Raperda. Hampir sebagian anggota DPRD yang baru menjadi anggota, dengan langkanya pengalaman mereka mengenai teknik perumusan Raperda menyebabkan berbagai kesulitan dalam pembahasan tersebut. Tetapi sebaliknya para anggota yang lama justru kurang membantu anggota baru untuk memahami cara perumusan Raperda, sehingga argumentasi yang diajukan oleh anggota yang baru ini tidak sesuai dengan tujuan yang dibahas. Persoalan ini biasanya dapat diatasi oleh ketua Pansus yang netral dan tidak memihak kepentingan manapun juga dan kesadaran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan pentingnya musyawarah dan mufakat.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa, sebelumnya Pansus sudah memberikan masukan-masukan kepada anggota baru untuk memahami teknik dalam perumusan/pembahasan Raperda yang diajukan oleh Eksekutif. Tetapi masih terlihat minimnya pengetahuan anggota baru. Hal tersebut dapat dimaklumi bersama walaupun secara umum tingkat pendidikan anggota DPRD dianggap cukup tinggi. Namun latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD

Provinsi Kalimantan Barat turut mempengaruhi SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya bermuara pada kemampuan melaksanakan fungsi legislasi. Berdasarkan kondisi ini dapat dikatakan bahwa, kualitas SDM DPRD provinsi Kalimantan Barat tergantung kemampuan anggota dalam mengaplikasikan fungsi legislasinya yang sangat memerlukan kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintah daerah tersebut. Kemampuan anggota yang minim tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya, misalnya membuat Peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur), menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2. Faktor Pengalaman

Seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat disebut berpengalaman jika ia senantiasa menghasilkan karya/pandangan baru dalam bidangnya, bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikut dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi pendekatannya dalam menangani masalah pembangunan, dan senantiasa meningkatkan ketrampilan profesionalnya sebagai anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat. Pendapat diatas dibenarkan oleh sebagian besar informan yang berhasil diwawancarai diantaranya Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, memberikan keterangan bahwa pada prinsipnya, pengalaman anggota DPRD secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, karena pengalaman tersebut akan menjadi dasar pijaknya dalam menghadapi suatu masalah, disamping itu akan memberikan tambahan dalam berpikir, bertindak dan bertindak, termasuk dalam *manage* permasalahan.

Diketahui bahwa, pengalaman anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. Pengalaman seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dewan, karena dia bisa mengetahui kendala-kendala yang ada dari periode sebelumnya, sehingga pengalaman yang dimiliki oleh anggota yang pernah duduk dilembaga legislatif tersebut dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi.

Diketahui bahwa, sebagian besar anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam organisasi kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat informan bahwa, setiap anggota DPRD pasti pernah aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik itu dalam lingkup kecil sampai lingkup nasional, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa anggota DPRD yang tidak begitu aktif dalam organisasi kemasyarakatan, seperti pengalaman dalam partai politik. Berdasarkan pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa, faktor pengalaman merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan fungsi, karena dengan pengalamannya itu anggota DPRD dapat menggali informasi yang berkualitas, valid dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan kebijakan yang tepat pula. Faktor kedua adalah pentingnya data/informasi, sehingga faktor pendidikan menempati posisi terakhir karena pengaruhnya terhadap kemampuan DPRD relatif kecil dalam melaksanakan fungsi legislasi. Namun, faktor pengalaman bukan segala-galanya, karena harus juga didukung oleh tingkat intelektual yang tinggi dan faktor legitimasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal, *pertama*, bahwa secara politik memilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah hak politik rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang

dipercayainya, bukan soal keserjanaan. *Kedua*, bahwa Dewan dan para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas Dewan dan anggotanya merupakan cerminan dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan.

3. Faktor Penguasaan Data dan informasi

Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data/informasi, antara lain adalah: bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan baru guna pemecahan masalah-masalah dan guna mengurangi timbulnya masalah-masalah serupa di masa mendatang, semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan seluruh sektor dan seluruh kegiatan. Berkenaan dengan hal ini, hasil observasi mengatakan bahwa, ternyata data/informasi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat cukup banyak tersedia baik itu melalui informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat atau pengimanan delegasi. Disamping itu anggota Dewan juga aktif dalam mencari dan menggali data/informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Kemampuan anggota DPRD dalam menghimpun data dan informasi menggunakan cara antara lain: *Pertama*: melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi untuk mencari mengenai aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh Gubernur setempat. *Kedua*: Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke Daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut digodak oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa, kualitas data/informasi yang diterima DPRD Provinsi Kalimantan Barat masih rendah/kurang berkualitas dalam arti informasi tersebut masih mentah jadi perlu diolah kembali dengan membandingkannya dengan berbagai sumber informasi yang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Banleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil diwawancarai, menyatakan memang informasi yang didapatkan dari masyarakat sudah cukup banyak, namun masih diragukan kualitasnya, untuk itu perlu dilakukan *cross check* kembali kepada sumber informasi yang lain, sehingga didapatkan data/informasi yang benar-benar berkualitas. Validitas data/informasi yang dimaksud disini adalah apakah data dan informasi yang diperoleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, karena Informasi yang tepat untuk pencari informasi yang tepat, akan menentukan keputusan yang tepat pula. Karena itu, informasi yang bernilai tinggi akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu diperlukan kerja keras dari anggota Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat. Kondisi ini diakui oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD kurang memadai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga seringkali anggota DPRD tertentu mendapatkannya bukan dari DPRD tetapi dari jalur informal/pribadi dan tidak semua anggota DPRD memilikinya, tergantung dari kualitas SDM anggota Dewan dan kemauan untuk mencari informasi yang valid.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dapat diinterpretasikan bahwa, informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam mengambil suatu kebijakan, diantaranya karena informasi yang ada belum tentu akurat, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Disini diperlukan adanya sarana pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang memadai dan mudah diperoleh, karena tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh maka para anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:
 - a. Pelaksanaan sebagai perwakilan, terlihat dari banyaknya tuntutan/aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga ini, selama kurun waktu 2010-2012 banyak kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan, baik dalam bentuk unjuk rasa, mengirim delegasi hingga meminta audiensi dengan anggota DPRD.
 - b. Dalam pelaksanaan kegiatan legislasi, terlihat Raperda yang dihasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2009-2014 relatif masih rendah, yakni banyak Peraturan Daerah selama kurun waktu 2010-2012. tidak mencapai target bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun.
 - c. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data dan informasi yang memadai.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:
 - a. Faktor kemampuan anggota DPRD, dilihat dari tingkat pendidikan secara umum relatif cukup tinggi, secara keseluruhan dapat dikatakan cukup tinggi, karena dari 55 orang anggota sekitar 61.82% adalah sarjana (S1) selebihnya sarjana muda dan tamatan SLTA. Namun mengenai kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam penyusunan Raperda belum sesuai dengan harapan. Minimnya pengetahuan mempengaruhi kemampuan dalam menyerap berbagai masalah dan isu Raperda, selain itu pembahasan Raperda yang sudah masuk dalam prolegda akan memakan waktu yang lama, karena dibutuhkan ketelitian dan kecermatan.
 - b. Faktor pengalaman yang dimiliki anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat berpengaruh terhadap penyusunan Raperda. Karena anggota DPRD yang baru belum pernah mempunyai pengalaman sebagai anggota dewan sebelumnya, sedangkan untuk menyesuaikan diri perlu waktu satu hingga dua tahun. Di samping itu kapasitas kemampuan masing-masing anggota DPRD berbeda beda.
 - c. Faktor penguasaan data dan informasi belum memberikan dukungan yang maksimal, sehingga banyak permasalahan yang membutuhkan solusi melalui kebijakan yang tidak diserap oleh anggota DPRD. Hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi legislasi, seperti kurangnya dukungan data dan informasi yang valid.

B. Saran

1. Perlu dibina secara lebih baik jalinan hubungan antara lembaga legislatif khususnya anggota DPRD dengan anggota masyarakat yang mereka wakili, baik secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan
2. Perlu dilakukan penetapan jadwal kegiatan pembahasan Raperda, memberikan saran pendapat untuk memperluas segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat kepada Gubernur yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya
3. Perlu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Apter, David E.1996. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Azra, Azyumardi. 2001. *Politik Lokal dan pembelajaran Politik*. Jakarta: Jurnal Ilmu pemerintahan.

- Budiharjo, Meriam. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Rajuvenasi Aliran (Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Keempat)*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- , 2008. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haricahyono, Cheppy. 2001. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Haryanto. 2002. *Sistem Politik*. Yogyakarta: Liberty.
- Huntington, Samuel P. 2004. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Agenda Kebijakan Administrasi Negara*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Imawan, Riswandha. 2000. *Agenda Politik dan Ekonomi dalam Format Reformasi Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani, dalam Menbangkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2005. *Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Fungsi Legislatif Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'ud, Mochtar. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mulanggeng, Andi A. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*. Malang: RIGRAF Publishing bekerjasama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah.
- Marbun, R.N. 2004. *DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur Deliar. 2003. *Pengantar Kepemikiran Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Prawirosentono, Suyadi. 2002. *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE.
- Rasyid, M. Ryaas. 2007. *Kajian Birokrasi Pemerintah dan Politik ORBA*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- , 2010. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yakarta: Pustaka Relajar.
- Rosadi, Otong. 2008. *Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah*. Jakarta: Jurnal Wacana Paramarta. Vol 7 No. 1.
- Sanit, Arbi. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2009. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Thaib, Dahlan. 2000. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Thoha, Miftha. 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul Salichin. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Certa.
- Wisistiono, Sadu dan Wiyoso Yonatan. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung: Fokusmedia.

Dokumen Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR/DPD, dan DPRD
- Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1 tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Barat